

**PENGARUH PERUBAHAN LAHAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN
PENDAPATAN BEBERAPA SEKTOR PEREKONOMIAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA : STUDI DI PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

ANISA AWALUL KHOIRIAH



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

ABSTRACT

**EFFECTS OF CHANGES IN LAND, POVERTY LEVELS, AND INCOME
SECTORS OF THE ECONOMY ON THE INDEX OF HUMAN
DEVELOPMENT : A STUDY IN THE LAMPUNG PROVINCE**

By

ANISA AWALUL KHOIRIAH

In each region that are transitioning from an agricultural economic activity to industrial economic activity has always faced deforestation or forest cover changes in Lampung Province. Changes in forest cover can affect the value of the Human Development Index (HDI). One of the cause of forest decline is a result of poverty sourced by low access to land resources. Furthermore, revenue in the sectors of the economy if hypothesized was also influenced by changes in the value of the HDI. This study aims to determine the impact of changes in forest cover and land, poverty, and income in the economic sectors of the IPM. This study was conducted in September 2015-January 2016, which consists of laboratory activity, namely the determination of land cover change in 2002, 2009, and 2013 through processing of satellite imagery data and then continued with field checks. Data of the poverty, income in the economic sectors and IPM obtained through the acquisition of data from the BPS. Multiple linear regression modelling applied to the

response variable HDI with explanatory variables such as changes in forest cover and human welfare indicators.

Optimization parameters used Minitab 11. The conclusions of the results of the regression modelling showed that the proportion of state forests (*p value* = 0,037), community forests (*p value* = 0,009), fields (*p value* = 0,040), open land (*p value* = 0,307), poverty kemiskinan (*p value* = 0,595), disadvantaged families (*p value* = 0,034) and economic growth (*p value* = 0,146) could decrease the performance of HDI next two years. While the land up (*p value* = 0,675), GDP in the transport sector (*p value* = 0,002), communications (*p value* = 0,071), services sector (*p value* = 0,067) and in others (*p value* = 0,066) can markedly increase the number IPM in Lampung province.

Keywords: Forest cover, HDI, Poverty, Sector of Economy.

ABSTRAK

PENGARUH PERUBAHAN LAHAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PENDAPATAN BEBERAPA SEKTOR PEREKONOMIAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA : STUDI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ANISA AWALUL KHOIRIAH

Pada setiap wilayah yang sedang bertransisi dari aktivitas perekonomian agraris menuju ke aktivitas perekonomian industri selalu dihadapkan pada deforestasi atau perubahan tutupan hutan termasuk di provinsi Lampung. Perubahan tutupan hutan dapat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu penyebab penurunan tutupan hutan adalah kemiskinan yang berakibat dari rendahnya akses terhadap sumber daya lahan. Kecuali itu, pendapatan di sektor-sektor ekonomi jika di hipotesiskan juga berpengaruh terhadap perubahan nilai IPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan tutupan hutan dan lahan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan di sektor-sektor ekonomi terhadap IPM. Penelitian dilakukan pada September 2015-Januari 2016, yang terdiri dari aktivitas Laboratorium yaitu penetapan perubahan tutupan lahan tahun 2002, 2009, dan 2013 melalui pengolahan data citra satelit kemudian dilanjutkan dengan pengecekan lapang. Data tingkat kemiskinan, pendapatan di sektor-sektor

ekonomi dan IPM diperoleh melalui akuisisi data dari BPS. Pemodelan regresi linier berganda diterapkan dengan variabel respon IPM dengan variabel penjelas berupa perubahan tutupan hutan dan indikator kesejahteraan manusia. Optimasi parameter menggunakan minitab 11. Simpulan dari hasil pemodelan regresi menunjukkan bahwa proporsi hutan negara ($p\ value = 0,037$) hutan rakyat ($p\ value = 0,009$), sawah ($p\ value = 0,040$), lahan terbuka ($p\ value = 0,307$), kemiskinan ($p\ value = 0,595$), keluarga prasejahtera ($p\ value = 0,034$) dan pertumbuhan ekonomi ($p\ value = 0,146$) dapat menurunkan capaian IPM dua tahun berikutnya. Sedangkan lahan terbangun ($p\ value = 0,675$), PDRB di sektor pengangkutan ($p\ value = 0,002$), komunikasi ($p\ value = 0,071$), jasa ($p\ value = 0,067$) dan sektor lainnya ($p\ value = 0,066$) dapat menambah angka IPM di provinsi Lampung.

Kata kunci : IPM, Kemiskinan, Sektor Perekonomian, Tutupan hutan.

**PENGARUH PERUBAHAN LAHAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN
PENDAPATAN SEKTOR PEREKONOMIAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA : STUDI DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Anisa Awal Khoiriah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN

Pada

Program Studi Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PENGARUH PERUBAHAN LAHAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PENDAPATAN BEBERAPA SEKTOR PEREKONOMIAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Nama Mahasiswa : **Anisa Awalul Khoiriah**

NPM : 1114151007

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
NIP. 196105051987031002

Trio Santoso S.Hut., M.Sc.
NIP. 198503102014141002

2. **Ketua Jurusan Kehutanan**

Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.
NIP.197705032002122002

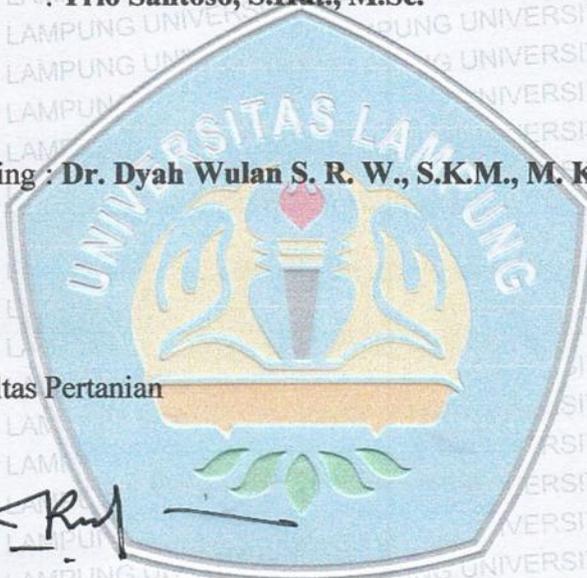
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.

Sekretaris : Trio Santoso, S.Hut., M.Sc.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Dyah Wulan S. R. W., S.K.M., M. Kes.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP. 196110201986031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 April 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Utara pada tanggal 13 September 1993. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hendri Tumiran dan Ibu Lilis Suryani. Jenjang pendidikan penulis dimulai pada tahun 1999 di Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar Mulia, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Terbanggi Besar 2005 hingga tamat pada tahun 2008, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baradatu dan menyelesaikannya pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis.

Pada tahun 2013, penulis melakukan KLK (Kuliah Lapangan Kehutanan) di Puslitbanghut Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, CIFOR dan Kebun Raya Bogor. Kemudian pada tahun 2015, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. KKN bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki selama masa perkuliahan untuk dapat membantu masyarakat menghadapi permasalahan yang ada

pada masyarakat. Tahun 2014 penulis melakukan Praktek Umum selama satu bulan di KPH Cepu BKPH Cabak. Penulis pernah menjadi asisten dosen pada mata kuliah Pengantar Valuasi Ekonomi Kehutanan tahun 2015 dan Pengantar Ekonomi Sumberdaya Hutan tahun 2016.

Dalam organisasi, penulis pernah menjadi anggota utama Himasyilva (Himpunan Mahasiswa Kehutanan) dan Ketua Bidang Kemuslimahan di FOSI (Forum Studi Islam) tahun 2013—2014.

Saya persembahkan karya kecil ini untuk Ayah Hendri Tumiran, Ibu Lilis Suryani tercinta serta adikku Ulfi Isnaini Azizah dan Hafiz Zakiyyah Amalia. Terima kasih atas doa, motivasi, dukungan dan kasih sayang yang tak pernah putus serta tak pernah lelah menanti keberhasilanku. Serta teman-teman yang telah membantu dalam penelitian ini.

SANWACANA

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Pengaruh Perubahan Lahan, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Sektor Kehutanan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia : Studi di Provinsi Lampung*”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan di hari akhir akan mendapatkan syafaatnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan saran berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M. Si., sebagai pembimbing utama saya atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Trio Santoso, S.Hut., M.Sc., selaku Pembimbing kedua penulis, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan.
3. Ibu Dr. Dyah Wulan S. R. Wardani, S. K. M., M. Kes., selaku Pembahas yang telah memberikan arahan, nasehat, bimbingan, dan masukan.

4. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M. S., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
7. Teman-teman angkatan 2011 atas kebersamaannya mulai dari langkah awal di kehutanan hingga sekarang, penulis sangat menyayangi kalian serta terima kasih atas canda dan tawa yang akan selalu terkenang manis oleh penulis.
8. Tim penelitian (Adhitya Adhyaksa, Agustin Arisandi Mustika, Lirih Wigaty, Rita Rosari Sijabat, dan Umami Dienelly) atas kerjasama dan usaha yang kita lalui selama penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka semua yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum wr. wb.

Bandar Lampung, Juli 2016
Penulis,

Anisa Awalul Khoiriah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Hipotesis | 4 |
| F. Kerangka Pemikiran Pemecahan Masalah..... | 4 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Perubahan Tutupan Lahan dan Hutan..... | 6 |
| B. Kemiskinan | 8 |
| C. Pertumbuhan Ekonomi..... | 12 |
| D. Peranan Sektor-sektor Ekonomi | 14 |
| E. Indeks Pembangunan Manusia | 15 |
| III. METODE PENELITIAN | 21 |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 21 |
| B. Alat dan Objek Penelitian | 21 |
| C. Data yang Dikumpulkan | 22 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 22 |
| E. Prosedur Penelitian | 23 |
| F. Pengolahan dan Analisis Data | 26 |
| G. Pemodelan dan Uji Hipotesis..... | 27 |
| IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 29 |
| A. Kondisi Geografis Provinsi Lampung | 29 |
| B. Kondisi Topografi Provinsi Lampung | 29 |

| | Halaman |
|--|-----------|
| C. Klimatologi Provinsi Lampung..... | 30 |
| D. Administrasi Pemerintahan | 30 |
| E. Penduduk Provinsi Lampung..... | 31 |
| F. Aspek Kawasan Hutan | 32 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| 1. Dinamika Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan | 36 |
| 2. Dinamika Perubahan Nilai IPM di Provinsi Lampung dalam Kurun Waktu Satu Dekade Terakhir | 41 |
| B. Pembahasan..... | 47 |
| 1. Hubungan Perubahan Penggunaan Tutupan Lahan, Tingkat Kemiskinan dan Sektor Perekonomian terhadap Kesejahteraan Manusia | 47 |
| a. Hubungan Antara Perubahan Penggunaan Perubahan Tutupan Lahan (Hutan Negara, Hutan Rakyat, Sawah, Lahan Terbangun dan Lahan Terbuka) dengan Nilai IPM..... | 49 |
| b. Keterkaitan Hutan Rakyat dengan IPM | 51 |
| c. Keterkaitan Luas Sawah dengan IPM..... | 53 |
| d. Keterkaitan Lahan Terbangun dengan Nilai IPM..... | 55 |
| e. Keterkaitan Lahan Terbuka dengan Nilai IPM..... | 56 |
| 2. Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Nilai IPM | 57 |
| a. Keterkaitan Tingkat Kemiskinan dengan Nilai IPM | 57 |
| b. Keterkaitan Keluarga Pra Sejahtera dengan Nilai IPM | 59 |
| c. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Nilai IPM | 60 |
| 3. Hubungan Antara Sektor Perekonomian dengan Nilai IPM.... | 62 |
| a. Keterkaitan PDRB Sektor Kehutanan dengan nilai IPM ... | 62 |
| b. Keterkaitan PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan nilai IPM | 63 |
| c. Keterkaitan PDRB Sektor Jasa dengan nilai IPM..... | 65 |
| d. Keterkaitan PDRB Sektor Lainnya (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan dan Perdagangan) dengan nilai IPM..... | 67 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN | 76 |
| Gambar | 76 |
| Tabel | 76-85 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Provinsi Lampung tahun 2013 | 31 |
| 2. Luas penutupan Lahan dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Lampung | 34 |
| 3. Hasil Statistik Proporsi Tutupan Rata-rata Hutan Negara, Hutan Rakyat, Sawah, Lahan Terbangun dan Lahan Terbuka tahun 2002, 2009 dan 2013 berdasarkan Interpretasi Citra Landsat | 37 |
| 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2002, 2009 dan 2013 | 43 |
| 5. Hasil Optimasi Parameter Model Pengaruh Perubahan Tutupan Hutan, Lahan dan Tingkat Kemiskinan serta Pendapatan Beberapa Sektor Perekonomian terhadap IPM | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Kerangka Pemikiran Pemecahan Masalah..... | 5 |
| 2. Bagan Alir Prosedur Penelitian..... | 26 |
| 3. Diagram Alir Tahap Identifikasi Citra Landsat | 27 |
| 4. Grafik Pembagian Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung..... | 34 |
| 5. Peta Perubahan Tutupan Hutan dan Penggunaan Lahan tahun 2002..... | 36 |
| 6. Peta Perubahan Tutupan Hutan dan Penggunaan Lahan tahun 2009..... | 37 |
| 7. Peta Perubahan Tutupan Hutan dan Penggunaan Lahan tahun 2014..... | 37 |
| 8. Perubahan Proporsi Tutupan Hutan Negara di Provinsi Lampung pada tahun 2002, 2009, 2014..... | 40 |
| 9. Perubahan Proporsi Tutupan Hutan Rakyat di Provinsi Lampung pada tahun 2002, 2009, 2014..... | 40 |
| 10. Perubahan Proporsi Tutupan Hutan Sawah di Provinsi Lampung pada tahun 2002, 2009, 2014..... | 41 |
| 11. Perubahan Proporsi Tutupan Hutan Lahan Terbangun di Provinsi Lampung pada tahun 2002, 2009, 2014..... | 41 |
| 12. Perubahan Proporsi Tutupan Hutan Terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 2002, 2009, 2014..... | 41 |

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 13. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Lampung Barat tahun 2004—2013 | 45 |
| 14. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Tanggamus tahun 2004—2013 | 45 |
| 15. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2004—2013..... | 45 |
| 16. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Lampung Timur tahun 2004—2013 | 46 |
| 17. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2004—2013 | 46 |
| 18. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Lampung Utara tahun 2004—2013 | 46 |
| 19. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Way Kanan tahun 2004—2013 | 47 |
| 20. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Tulang Bawang tahun 2004—2013 | 47 |
| 21. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Bandar Lampung tahun 2004—2013..... | 47 |
| 22. Grafik Dinamika Perubahan Nilai IPM Kabupaten Lampung Barat tahun 2004—2013..... | 48 |
| 23. Grafik Hubungan Luas Hutan Negara dengan IPM..... | 51 |
| 24. Grafik Hubungan Luas Hutan Rakyat dengan IPM..... | 54 |
| 25. Grafik Hubungan Luas Sawah dengan IPM | 56 |
| 26. Grafik Hubungan Luas Lahan Terbangun dengan IPM..... | 57 |
| 27. Grafik Hubungan Luas Lahan Terbuka dengan IPM..... | 58 |
| 28. Grafik Hubungan Luas Kemiskinan dengan IPM..... | 60 |
| 29. Grafik Hubungan Luas Keluarga Pra Sejahtera dengan IPM..... | 61 |

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 30. Grafik Hubungan Luas Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM | 63 |
| 31. Grafik Hubungan Luas PDRB Sektor Kehutanan dengan IPM.... | 64 |
| 32. Grafik Hubungan Luas PDRB Sektor Pengangkutan dengan IPM | 66 |
| 33. Grafik Hubungan Luas PDRB Sektor Komunikasi dengan IPM | 66 |
| 34. Grafik Hubungan Luas PDRB Sektor Jasa dengan IPM | 68 |
| 35. Grafik Hubungan Luas PDRB Sektor Lainnya dengan IPM | 69 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perubahan tutupan lahan yang semula berupa hutan menjadi tidak berhutan secara umum dikenal sebagai deforestasi (Bakri, 2012). Salah satu penyebab deforestasi adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumberdaya lahan. Menurut laporan *United Nations Development Program* (UNDP) (2007) dalam Hastuti, (2007) bahwa jumlah penduduk Indonesia lebih dari 110 juta yang masih hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari, bahkan sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara bertempat tinggal di Indonesia. Seiring dengan tingkat kemiskinan, penambahan jumlah penduduk juga dapat meningkatkan tekanan terhadap penggunaan sumberdaya hutan yang bermuara pada deforestasi yang akut (Bakri, 2012).

Walaupun begitu, tidak setiap perubahan tutupan hutan berdampak negatif bagi pengembangan ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan, bahkan juga dapat berdampak positif. Secara umum dapat disaksikan wilayah-wilayah yurisdiksi terutama yang sudah berkembang menjadi wilayah urban mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dari pada wilayah-wilayah yang mempunyai dominasi oleh penggunaan lahan sebagai hutan. Sebagai contoh di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat yang

mempunyai tutupan hutan relatif lebih tinggi yaitu 50,56% dari luas wilayah memiliki nilai kesejahteraan (IPM) yang relatif rendah yaitu sebesar 69,40% dibanding dengan Kota Bandar Lampung dengan luas hutan 10,88% dan Metro dengan tutupan hutan yang lebih rendah sebesar 0,00% namun memiliki nilai kesejahteraan relatif lebih tinggi yaitu sebesar 77,17% di Bandar Lampung dan 77,53% di kota Metro (BPS, 2014).

Menurut Penelitian Naidoo (2004) dalam Bakri (2012), umumnya deforestasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selain alih fungsi lahan, tingkat kemiskinan dan pendapatan dari berbagai sektor-sektor ekonomi yang dalam hal ini akan dilihat dari nilai PDRB juga dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia.

Bersama dengan proses perubahan penggunaan lahan tersebut, secara implisit tercermin suatu proses transformasi struktural perekonomian. Bersama dengan itu pula terjadi proses peningkatan kesejahteraan baik yang diukur dengan penambahan pendapatan, pertumbuhan ekonomi maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi/daya beli (Mirza, 2012).

Belum banyak peneliti yang mempublikasikan hasil karyanya yang mengkaji tentang peranan tutupan hutan, tingkat kemiskinan, dan sektor-sektor perekonomian terhadap kesejahteraan (IPM). Berdasarkan latar belakang ini, maka menarik dilakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang perlu disingkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. perlu menetapkan dinamika perubahan penggunaan lahan terhadap nilai IPM provinsi Lampung periode waktu 2000—2014 .
2. perlu menentukan besarnya kontribusi peranan perubahan tutupan hutan, tingkat kemiskinan dan pendapatan sektor-sektor ekonomi terhadap nilai IPM di Provinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mendeskripsikan dinamika perubahan penggunaan lahan terhadap nilai IPM Provinsi Lampung periode waktu 2000—2014, dan
2. menentukan besar kontribusi tingkat kemiskinan dan pendapatan sektor-sektor ekonomi (PDRB) terhadap nilai IPM di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini setidaknya adalah :

1. memberikan data dan informasi tentang perubahan tutupan hutan dan penggunaan lahan di Provinsi Lampung serta pengaruhnya terhadap IPM.
2. sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

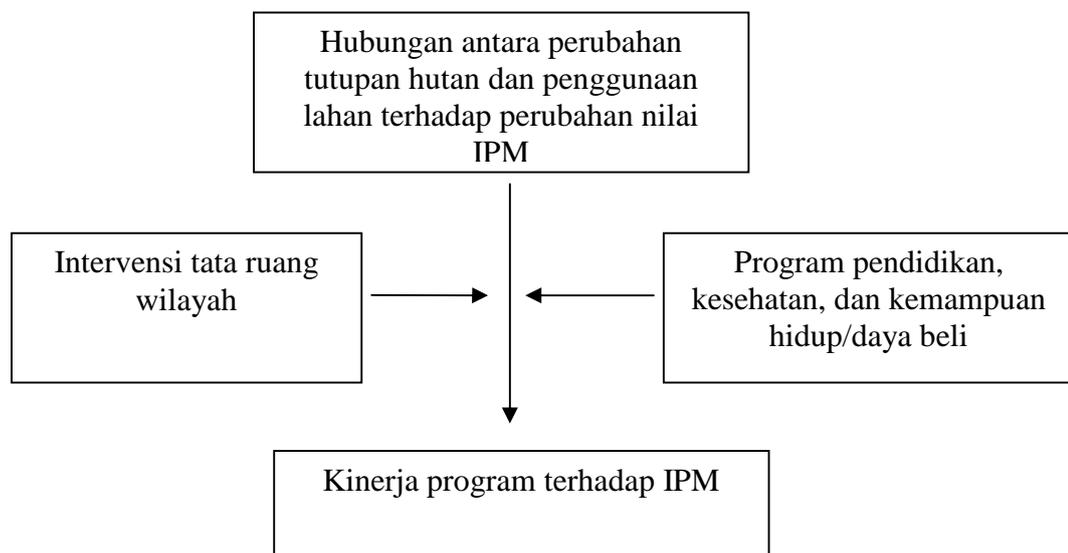
E. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah adanya perubahan penggunaan tutupan hutan dan lahan, tingkat kemiskinan serta pendapatan sektor-sektor ekonomi yang secara nyata akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

F. Kerangka Pemikiran Pemecahan Masalah

Melalui penelitian ini agar dapat diketahui hubungan antara perubahan tutupan hutan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan sektor-sektor ekonomi terhadap IPM. Penelitian ini berupaya memberi gambaran perubahan tutupan hutan dan penggunaan lahan yang berimplikasi terhadap berbagai kondisi kesejahteraan manusia dan juga berhubungan dengan perubahan IPM. Dengan diungkapnya hubungan tersebut pihak otoritas wilayah Provinsi Lampung dapat melakukan berbagai macam kebijakan yang sifatnya makro maupun kebijakan mikro.

Kebijakan yang bersifat makro dapat dilakukan berbagai macam intervensi kebijakan dalam penggunaan lahan seperti pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berfungsi sebagai alat pengendali penggunaan lahan (Purwantoro, dan Bahri, 2014). Sedangkan kebijakan yang bersifat mikro dapat dilakukan peningkatan kinerja dari program pendidikan dan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program. Penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan adalah keseriusan pemerintah dalam menanganinya. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan konsumsi masyarakat adalah merupakan bagian dari nilai kesejahteraan (IPM). Dengan demikian program peningkatan ketahanan kesejahteraan dapat dilakukan. Kerangka pemecahan masalah disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka pemikiran pemecahan masalah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perubahan Tutupan Lahan dan Hutan

Seperti yang di ungkapkan Long *et al* (2006) dalam Dwiprabowo, dkk (2014), akhir-akhir ini, isu yang berhubungan dengan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan (*Land Use Land Use Change, LULC*) telah menarik perhatian dari berbagai bidang penelitian. Industrialisasi, penambahan penduduk dan perpindahan penduduk ke kota dinilai sebagai faktor yang paling berkontribusi dalam perubahan penggunaan lahan dalam skala global .

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan industrialisasi berkontribusi besar terhadap penurunan luas hutan di beberapa daerah dan sebaliknya penambahan luas hutan di beberapa kawasan lain membentuk pola umum perubahan luas tutupan hutan seiring dengan pembangunan ekonomi. Dalam tiga dekade terakhir, pola perubahan tutupan hutan di Indonesia sangat terkait dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial dan ekonomi, semakin tinggi laju pertumbuhan sosial ekonomi akan mendorong penurunan tutupan hutan. Meskipun demikian, di sejumlah wilayah justru dengan semakin tingginya laju pertumbuhan pembangunan ekonomi cenderung mengurangi laju kehilangan tutupan hutan akibat deforestasi dan bahkan bisa meningkatkan tutupan hutan seperti yang disampaikan Yackulic *et al* (2011) dalam Dwiprabowo (2014).

1. Dinamika Transformasi Penggunaan Lahan

Menurut Nasution dan Winoto (1995) dalam Utoyo (2012) perubahan struktur penggunaan lahan bukanlah semata-mata fenomena fisik berkurangnya luasan lahan tertentu dan meningkatnya penggunaan lahan untuk penggunaan lainnya, melainkan mempunyai kaitan erat dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat. Perubahan orientasi tersebut berkaitan dengan terjadinya proses transformasi struktur perekonomian yang dicirikan semakin menurunnya pangsa relatif sektor primer (pertanian dan pertambangan) dan semakin meningkatnya pangsa relative sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa). Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian suatu wilayah terhadap sektor primer yang mempunyai nilai tambah (*value added*) yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier.

Penggunaan lahan terdiri dari penggunaan lahan di pedesaan dan penggunaan lahan di perkotaan. Contoh penggunaan lahan di pedesaan di antaranya adalah hutan, sawah, maupun pertanian dan peternakan. Kegiatan pengelolaan hutan contohnya adalah program hutan rakyat. Hutan Rakyat (HR) merupakan salah satu program Kementerian Kehutanan yang tujuannya selain untuk menyokong kebutuhan kayu industri/pertukangan, juga sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan manfaat ekologis dari lahan masyarakat karena ditanami komoditas kehutanan. Definisi HR menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhut-V/2004 adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya

lebih dari 50%. Sasaran pengembangan hutan rakyat diarahkan pada lahan milik rakyat, tanah adat atau lahan di luar kawasan hutan yang memiliki potensi untuk pengembangan hutan rakyat dapat berupa lahan tegalan dan lahan pekarangan yang luasnya memenuhi syarat sebagai hutan rakyat (Rahmayanti, 2012).

Seperti yang di uraikan Harjanti (2002) terdapat berbagai macam aktivitas yang menjadi ciri perkotaan, antara lain permukiman, industri, komersial, dan lain - lain. Dalam perkembangannya tiap aktivitas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi pemilihan ruang dan lokasi aktivitasnya.

Berdasarkan uraian dari Utoyo (2012) fenomena terjadinya perubahan struktur penggunaan lahan perkotaan tidak dipungkiri juga sangat dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi. Salah satu yang menjadi contoh adalah Kota Bandar Lampung, selama satu dekade, penduduk Kota Bandar Lampung telah tumbuh sebesar 18.6%, dengan rata-rata 1.8% pertahun. Jika pada tahun 2000 jumlahnya 743.109 jiwa, maka pada tahun 2010 telah bertambah menjadi 881.801 jiwa.

B. Kemiskinan

Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2009 tercatat masih cukup besar yakni, sekitar 32,5 juta jiwa atau lebih kurang 14,2 persen. Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada

umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai (Jonaidi, 2012).

Pengertian kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat, padahal jika dilihat secara luas kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang baik sosial maupun budaya dari masyarakat. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari pemenuhan papan, sandang, maupun pangan. Fenomena seperti hal ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal seperti ini dapat kita lihat pada suatu Negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial (Wijanarko, 2013).

Kemiskinan menurut *World Bank* dalam Jundi (2014) merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh *WorldBank* sebesar \$2/day atau sekitar Rp 22,000.00/hari.

Robert Chamber dalam Jundi (2014) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi sedangkan kelima dimensi tersebut membentuk suatu perangkap kemiskinan (*deprivation trap*), yaitu :

1. kemiskinan itu sendiri
2. ketidakberdayaan (*powerless*)
3. kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
4. ketergantungan (*dependency*)
5. keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional.

Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi (Jundi, 2014).

Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan (Jundi, 2014).

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Ada beberapa dimensi dalam memahami kemiskinan. Pertama, kemiskinan berdimensi ekonomi atau material yang menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia. Kedua, kemiskinan berdimensi sosial budaya, bahwa lapisan yang secara ekonomi miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Ketiga, dimensi struktural atau politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah (Nugroho, 1995) dalam (Agustinawati dan Siany, 2011).

Definisi kemiskinan dapat disimpulkan dalam beberapa hal:

- a) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, papan, pangan);
- b) ketidakmampuan mengakses kebutuhandasar hidup lainnya (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
- c) ketiada jaminan masa depan (tidak memiliki investasi apapun untuk keluarga);
- d) kerentanan terhadap guncangan, baik yang bersifat individual maupun massal;
- e) rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan SDA;
- f) termarginalkan dalam kegiatan sosial masyarakat;
- g) ketidakmampuan mengakses pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- h) ketidakmampuan berusaha karena difabel; dan

- i) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin).

Berdasarkan beberapa dimensi kemiskinan di atas, maka kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk atau macam, yaitu: *Pertama*, kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, seperti; sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perumahan. Atau, dalam perspektif Bank Dunia, kemiskina sebagai hidup dengan pendapatan dibawah 1 dolar setiap hari. *Kedua*, kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak merata, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. *Ketiga*, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti; sifat malas, pola hidup boros, tidak kreatif. *Keempat*, kemiskinan struktural, yakni; kemiskinan yang terjadi akibat kurangnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan, bahkan menambah suburnya kemiskinan. *Kelima*, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak mendukung adanya peningkatan pendapatan. *Keenam*, kemiskinan buatan, yaitu; kemiskinan terjadi akibat dari sistem modernisasi yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang tidak merata (Makmun, 2014).

C. Pertumbuhan Ekonomi

Seperti yang diungkapkan Ramdani (2015) perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun.

Sejak tahun 2004 hingga sekarang laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang positif. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik, tetapi lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, namun sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil.

Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznet dalam Todaro (2004) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusi, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Sedangkan menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan kenaikan output perkapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya (Ramdani, 2015).

D. Peranan Sektor-sektor Ekonomi

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa (Sukmaraga, 2011).

Seperti yang diungkapkan Adisasmita (2013) dalam Cahyono *et al* (2014) Untuk mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan fokus pengembangan sektor ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain.

Kontribusi sektoral menunjukkan peran atau sumbangan suatu sektor tertentu terhadap perkembangan ekonomi kabupaten yang merupakan perbandingan antara sumbangan ekonomi sektoral terhadap besarnya PDRB suatu kabupaten yang dinyatakan dalam persentase. Semakin besar nilai persentase suatu sektor terhadap PDRB menunjukkan semakin besarnya peran sektor bersangkutan dalam suatu perekonomian (Cahyono *et al*, 2014).

Widodo (2006) dalam Sulaksono (2015) menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun dan mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/antar propinsi. Aryanto (2011) dalam Sulaksono (2015) mengatakan bahwa yang lebih relevan untuk digunakan adalah nilai PDRB berdasar harga konstan daripada PDB atas dasar harga berlaku.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi sudah sejak lama terjadi. Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan telah digugat oleh kalangan ekonomi maupun non-ekonomi yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan beberapa indikator baru. Indikator baru

secara umum berfokus pada pembangunan manusia (Setiawan dan Hakim, 2013).

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli) (Mirza,2012). Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya (Patta, 2012).

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor didalamnya. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

1. Umur Harapan Hidup

Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data masukan yang digunakan untuk

menghitung angka umur harapan hidup; yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*means years schooling*) dan angka melek huruf.

Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

3. Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan GDP riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (Susetyo, 2011).

Seperti yang juga dituliskan oleh Patta (2012) dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu.

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).

3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan

Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 = Indeks harapan hidup

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

Dimana:

I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana $i = 1,2,3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

$\text{Max } X_i$ = Nilai maksimum X_i

$\text{Min } X_i$ = Nilai minimum X_i

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - \text{Min } X_i}{\text{Max } X_i - \text{Min } X_i}$$

Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai nilai ideal (100). Angka ini dapat diperbandingkan antar daerah di

Indonesia. Dengan demikian tantangan bagi semua daerah adalah bagaimana menemukan cara yang tepat, dalam hal ini program pembangunan yang diterapkan masing-masing daerah, untuk mengurangi jarak terhadap nilai ideal. Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut (Sukmaraga, 2011):

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Jika IPM hanya dilihat dari pengeluaran per kapita saja, berarti hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/negara berdasarkan pendapatan per tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial (pendidikan dan kesehatan), maka akan dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat (Hidayat, 2008).

Sehingga dengan demikian secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain semakin tinggi/baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik (Ayomi, 2014).

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011).

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2015 — Januari 2016.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, serta alat tulis. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop dan kamera. Sedangkan untuk perangkat lunak yang digunakan adalah *software* GIS, *software* statistika, Microsoft Office dan Microsoft Excell. Adapun untuk objek dalam penelitian ini adalah citra satelit *path 123 row 063, path 123 row 064, path 124 row 063, path 124 row 064* dengan perekaman peta luas tutupan kawasan hutan dan lahan serta data dan informasi yang didapatkan dari dinas kabupaten/kota dan provinsi di lingkup Provinsi Lampung.

C. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber-sumber data.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Citra Landsat tutupan hutan dan penggunaan lahan (sawah, lahan terbangun dan lahan terbuka) di wilayah Provinsi Lampung. Data ini didapatkan dari hasil citra satelit *path 123 row 063, path 123 row 064, path 124 row 063, path 124 row 064*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Dinas maupun Instansi Pemerintahan yang berupa data IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, data tingkat kemiskinan (kemiskinan, keluarga pra sejahtera, dan pertumbuhan ekonomi) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, dan data pendapatan sektor perekonomian (PDRB sektor kehutanan, PDRB sektor pengangkutan, PDRB sektor komunikasi, PDRB sektor jasa, dan PDRB sektor lainnya) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang didapatkan dari BPS Provinsi Lampung.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan permodelan antara data perubahan tutupan hutan dan lahan, tingkat kemiskinan yang terdiri dari persentase kemiskinan dan keluarga pra sejahtera, pertumbuhan ekonomi serta pendapatan sektor-sektor perekonomian (PDRB) terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Pada dasarnya data tingkat kemiskinan, pendapatan di sektor-sektor ekonomi dan IPM akan diakuisisi dari data sekunder pada level kabupaten/kota di Provinsi Lampung baik yang didokumentasi maupun dipublikasi oleh instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data perubahan *land use* merupakan data primer yang diambil melalui interpretasi citra satelit yang kemudian akan disertai dengan pengecekan lapang.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini disajikan secara diagramatik dalam Gambar 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemodelan. Yang pada prinsipnya ada dua bagian besar dalam penelitian ini yaitu akuisisi data variabel penjelas dan variabel respon yang kemudian membangun model linier yang dapat menjelaskan hubungan antara keduanya.

1. Variabel Dependen/Respon (Yi)

Variabel dependen atau respon berupa jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam periode waktu 2004—2013. Data ini merupakan data sekunder yang diakuisisi dari Biro Statistik kabupaten/kota dan Provinsi Lampung. Data jumlah IPM disajikan dalam satuan persen pada satu dekade terakhir untuk semua kabupaten/kota di lingkup Provinsi Lampung. Data ini merupakan data variabel respon Yi.

2. Variabel Penjelas (prediktor)

Data variabel penjelas terdiri dari : (i) data tutupan hutan dan lahan (luas hutan Negara, luas hutan rakyat, luas sawah, luas lahan terbangun dan luas lahan

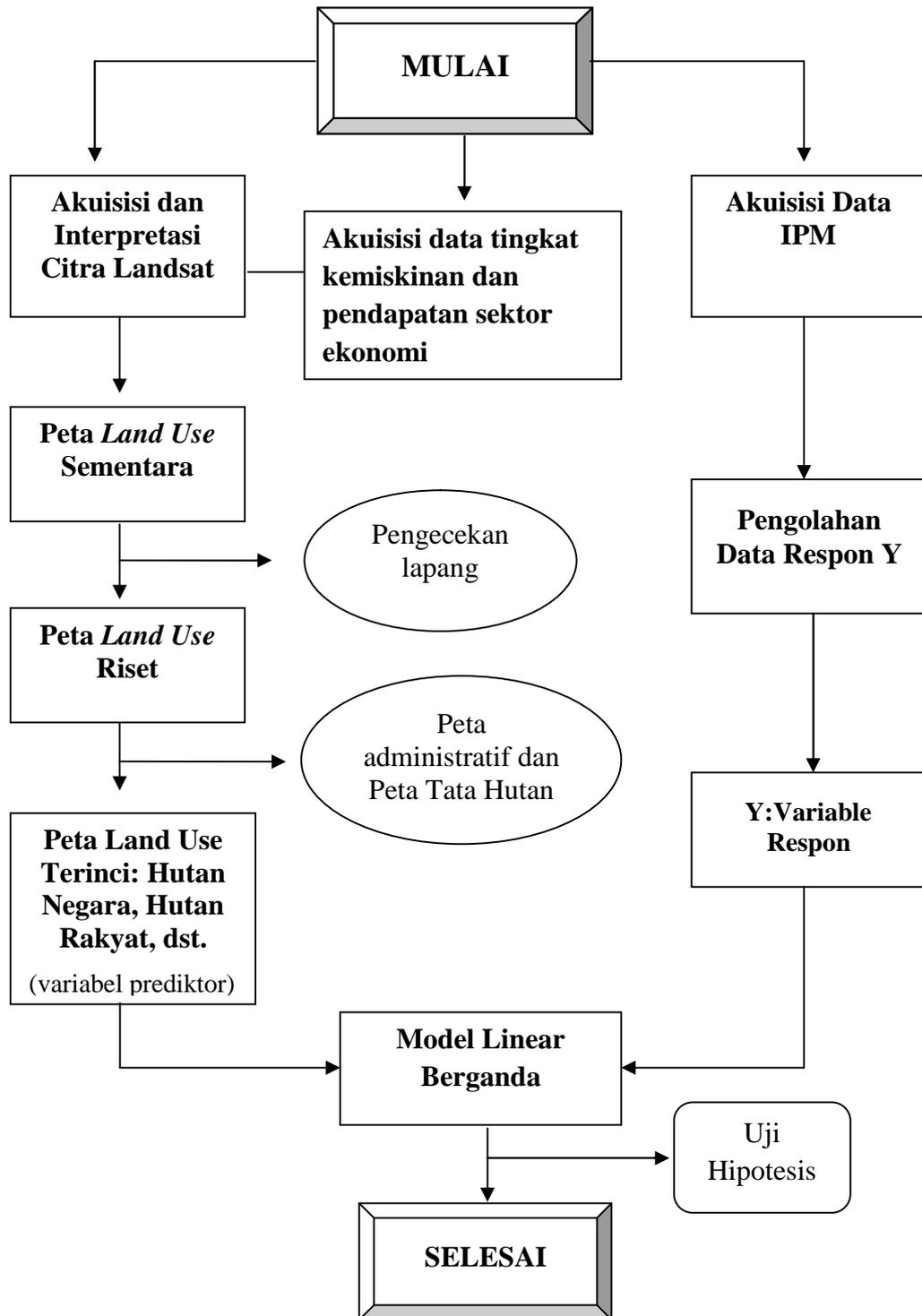
terbuka) dan (ii) data tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sektor-sektor perekonomian. Data (i) akan diakuisisi dan diekstrak dari citra satelit. Sedangkan data (ii) yang akan diakuisisi dari BPS Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung satu dekade terakhir.

3. Penyedia data luasan tutupan hutan dan lahan

Data tutupan hutan dan lahan pada prinsipnya merupakan data primer yang akan diakuisisi dan diinterpretasi melalui citra satelit dengan menggunakan *software ArcGIS*. Hasil interpretasi ini menghasilkan peta *land use* sementara untuk memperoleh validitas hasil interpretasi citra yang sah maka akan dilakukan pengecekan lapang. Kemudian peta *land use* sementara akan dikoreksi berdasarkan hasil pengecekan lapang sehingga diperoleh peta *land use* final.

Adapun untuk memperoleh distribusi luasan masing-masing penggunaan lahan ini (i) maka akan diadakan *overlaying* antara peta *land use* final dengan peta administratif Provinsi Lampung dan juga peta hutan dan perairan Provinsi Lampung (Permen LH No.16 tahun 2012). Dengan demikian akan diperoleh data (i) per hektar untuk periode satu dekade terakhir.

Bagan alir prosedur penelitian ini digambarkan pada Gambar 2 berikut.

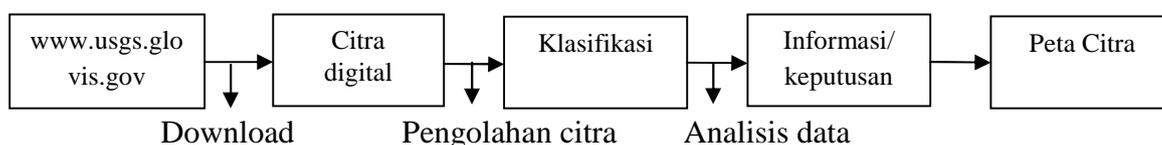


Gambar 2. Bagan Alir Prosedur penelitian.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model linier berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas (Variabel independen X) terhadap variabel tetap (Variabel dependen Y). Teknik ini disebut linier karena setiap estimasi atas nilai yang diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. Pengukuran pengaruh variabel ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , ..., X_n) yang mempengaruhi variabel tetap (Y).

Analisis citra adalah kegiatan menganalisis citra sehingga dapat menghasilkan informasi untuk mendapatkan ketetapan keputusan. Menurut Estes dan Simonett (1975) dalam Susanto (1992) mengatakan bahwa interpretasi citra merupakan perbuatan untuk memahami dan menafsirkan foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan mendapatkan informasi yang akurat serta menilai arti penting objek tersebut. Interpretasi citra ini dilakukan dengan menggunakan ArcGIS. Berikut cara yang akan dilakukan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alir Tahap Identifikasi Citra Landsat.

Berdasarkan Gambar 3 diatas hal yang pertama dilakukan adalah *mendownload* citra digital dari www.glovis.gov. Setelah itu, dilakukan pengolahan citra yang merupakan proses memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh

manusia/komputer untuk mendapatkan klasifikasi. Dari klasifikasi yang telah di dapatkan dilakukan analisis data untuk memperoleh informasi berupa peta citra baru. Masukan dan keluarannya berupa citra digital. Citra yang sudah diolah biasanya akan dianalisis untuk menghasilkan informasi berupa peta citra hingga dapat menetapkan keputusan berdasarkan tujuan yang dikehendaki.

G. Permodelan dan Uji Hipotesis

Data berupa jumlah IPM di Provinsi Lampung digunakan sebagai variabel terikat atau *response* (Y), sedangkan data perubahan tutupan hutan dan lahan digunakan sebagai variabel bebas atau *predictor* (X). Adapun model linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$[Y_i]_i = \beta_0 + \beta_1[HN]_{it} + \beta_2[HR]_{it} + \beta_3[SWH]_{it} + \beta_4[LTB]_{it} + \beta_5[LTK]_{it} + \beta_6[KMS]_{it} + \beta_7[KPS]_{it} + \beta_8[PREKO]_{it} + \beta_9[PKHT]_{it} + \beta_{10}[PPGKTN]_{it} + \beta_{11}[PKOM]_{it} + \beta_{12}[PJS]_{it} + \beta_{13}[PSL]_{it} + e_i$$

Keterangan:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| [Y _i] | = Data IPM pada tahun ke-i (%) |
| [HN] | = Proporsi Hutan Negara (%) |
| [HR] | = Proporsi Hutan Rakyat (%) |
| [SWH] | = Proporsi Luas Sawah (%) |
| [LTB] | = Proporsi Luas Lahan Terbangun (%) |
| [LTK] | = Proporsi Luas Lahan Terbuka (%) |
| [KMS] | = Kemiskinan (%) |
| [KPS] | = Keluarga Pra Sejahtera (%) |
| [PREKO] | = Pertumbuhan Ekonomi (%) |
| [PKHT] | = PDRB sektor kehutanan (%) |
| [PPGKTN] | = PDRB sektor pengangkutan (%) |
| [PKOM] | = PDRB sektor komunikasi (%) |
| [PJS] | = PDRB sektor jasa (%) |
| [PSL] | = PDRB sektor lain (%) |
| e_i | = <i>error</i> model |
| $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{15}$ | = Parameter Model |

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \dots \mu_{13} = 0$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \dots \mu_{13} \neq 0$$

Optimasi parameter model dengan menggunakan Minitab versi 16. Sedangkan uji hipotesis akan digunakan Uji T pada taraf nyata 5% dan 10%.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di bagian selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.288,35 km². Secara geografis Provinsi ini terletak diantara 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan dan 103° 40' – 105° 50' Bujur Timur. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964.

Provinsi ini meliputi areal daratan dan pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Sebelah Utara Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah Selatan dengan Selat Sunda, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia (BPS,2013).

B. Kondisi Topografi Provinsi Lampung

Secara topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi yaitu, daerah topografis berbukit sampai bergunung, berombak sampai bergelombang, dataran alluvial, dataran rawa pasang surut, dan daerah tangkapan aliran sungai (*river basin*) (BPS, 2013).

C. Klimatologi Provinsi Lampung

Provinsi Lampung yang terletak dibawah katulistiwa yaitu 5° LS memiliki iklim Tropis humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia. Ada dua musim angin setiap tahunnya, yaitu dari bulan November s/d Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut, sedangkan dari bulan Juli s/d Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan rata-rata 5,83 km/jam.

Pada daerah daratan dengan ketinggian 30m – 60m, temperatur udara berkisar antara 26°C – 28°C. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33,4°C dan temperatur minimum 21,7°C. Rata-rata kelembaban udara yang berkisar antara 75% - 85% dan bahkan lebih tinggi ditempat-tempat yang lebih tinggi (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2012).

D. Administrasi Pemerintahan

Secara administratif, Provinsi Lampung yang beribukota di Bandar Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) daerah kabupaten dan kota dengan 225 kecamatan dan 2.585 desa/kelurahan. Berikut ini luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Lampung tahun 2013 yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas wilayah, jumlah kecamatan, dan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Lampung tahun 2013

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km²) | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lampung Barat | 2.142,78 | 15 | 136 |
| Tanggamus | 3.020,64 | 20 | 302 |
| Lampung Selatan | 700,32 | 17 | 260 |
| Lampung Timur | 5.325,03 | 24 | 264 |
| Lampung Tengah | 3.802,68 | 28 | 307 |
| Lampung Utara | 2.725,87 | 23 | 247 |
| Way Kanan | 3.921,63 | 14 | 222 |
| Tulang Bawang | 3.466,32 | 15 | 151 |
| Pesawaran | 2.243,51 | 9 | 144 |
| Pringsewu | 625,00 | 9 | 131 |
| Mesuji | 2.184,00 | 7 | 75 |
| Tulang Bawang Barat | 1.201,00 | 8 | 80 |
| Pesisir Barat | 2.907,23 | 11 | 118 |
| Bandar Lampung | 296,00 | 20 | 126 |
| Metro | 61,79 | 5 | 22 |
| Provinsi Lampung | 34.623,38 | 225 | 2.585 |

Sumber : BPS tahun 2013

E. Penduduk Provinsi Lampung

Potensi penduduk Provinsi Lampung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1961 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 1.667.511 orang, 1971 sebanyak 2.775.695 orang, 1980 sebanyak 4.624.785 orang, 1990 sebanyak 6.015.803 orang, 2000 sebanyak 6.659.869 orang, dan 2010 sebanyak 7.608.405 orang. Pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 adalah sebesar 5,77 persen pertahun dan mengalami penurunan pada periode 1980-1990 menjadi 2,67 persen pertahun. Sedangkan periode 1990-2000 sebesar 1,17 persen dan mengalami kenaikan pada periode 2000-2010 menjadi 1,24 persen (BPS,2013).

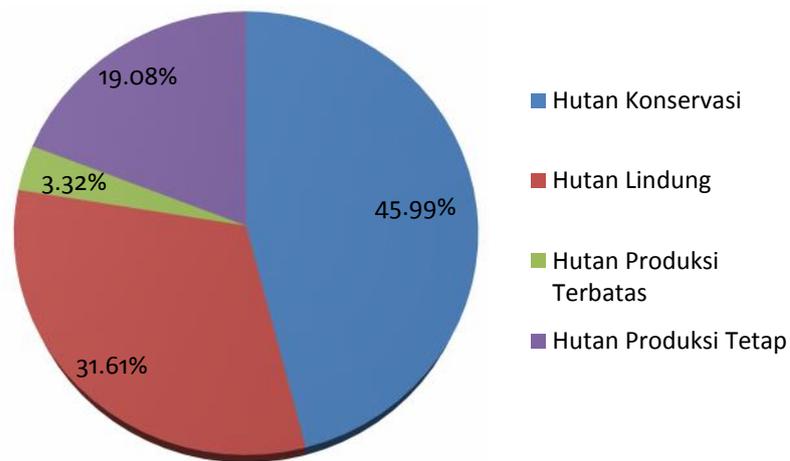
F. Aspek Kawasan Hutan

1. Luas Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Provinsi Lampung telah ditunjuk sejak jaman Pemerintah Kolonial Belanda, hal tersebut terbukti dengan adanya bukti-bukti surat penetapan tentang kawasan hutan yang masih dijadikan sebagai acuan/referensi untuk pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Lampung. Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami 3 kali penetapan, yaitu:

- a. SK. No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991, dengan kawasan hutan seluas 1.237.268 ha
- b. SK. No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999, dengan kawasan hutan seluas 1.144.512 ha
- c. Penunjukan kawasan hutan yang terakhir adalah SK MenhutNo256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung, luas hutan Provinsi Lampung adalah 1.00.735ha. Kawasan hutan tersebut meliputi:
 1. Hutan Konservasi seluas 462.030 ha
 2. Hutan Lindung seluas 317.615 ha
 3. Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 ha
 4. Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 ha

Persentase pembagian luas kawasan hutan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini (Biro Perencanaan Sekertaris Jendral Kementerian Kehutanan, 2013).



Gambar 4. Grafik Pembagian Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

2. Luas Penutupan Lahan

Berdasarkan data Statistika Kementerian Kehutanan tahun 2011, kondisi penutupan lahan di Provinsi Lampung berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 7ETM + Tahun 2009/2010 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Luas penutupan lahan dalam dan luar kawasan hutan di Provinsi Lampung.

| Penutupan Hutan | Kawasan Hutan | | | | | HPK | Jumlah | APL | Total | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|---|-----|-----|
| | Hutan Tetap | | | | HPK | | | | Jumlah | Jumlah | % | | |
| | KSA-KPA | HL | HPT | HP | | (A) | (B) | (C) | | | | (D) | (E) |
| A. Hutan | 257,5 | 50,1 | 14,5 | 25,8 | - | 347,9 | 24,2 | 373,2 | 11,1 | | | | |
| - Hutan Primer | 140,1 | 3,1 | 10 | - | - | 153,4 | 2,4 | 155,9 | 4,7 | | | | |
| - Hutan Sekunder | 117,5 | 47 | 4,2 | - | - | 168,6 | 14 | 182,6 | 5,5 | | | | |
| - Hutan Tanaman | - | - | - | 25,8 | - | 25,8 | 7,7 | 33,6 | 1,0 | | | | |
| B. Non Hutan | 204,5 | 267,6 | 18,9 | 165,9 | - | 656,8 | 2316,4 | 2973,3 | 88,9 | | | | |
| C. Tidak ada data | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | | | | |
| Total | 462 | 317,6 | 33,4 | 191,7 | - | 1004,7 | 2340,6 | 3345,3 | 100 | | | | |

Sumber: Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 2 luas penutupan hutan terbagi dalam 2 kategori yaitu penutupan kawasan hutan dan non hutan. Luas penutupan terbesar berada di kawasan non-hutan yakni sebesar 88,9% dan lainnya berada di kawasan hutan. Pada kawasan hutan tutupan terbesar berada di kawasan hutan sekunder yaitu 5,5% dari luas kawasan hutan di Provinsi Lampung, sedangkan 4,7% tutupan kawasan hutan berada di kawasan hutan primer dan 1,0% tutupan hutan berada di hutan tanaman.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan yaitu:

1. perubahan tutupan hutan dan penggunaan lahan berpengaruh terhadap perubahan nilai IPM. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai koefisien yang nyata menurunkan angka IPM adalah proporsi luas hutan negara sebesar $-0,04784$ ($p \text{ value} = 0,037$), nilai koefisien hutan rakyat sebesar $-0,08533$ ($p \text{ value} = 0,009$), nilai koefisien lahan sawah sebesar $-0,06150$ ($p \text{ value} = 0,040$). Sedangkan lahan terbuka dengan nilai koefisien $-0,04865$ ($p \text{ value} = 0,307$) berpengaruh menurunkan angka IPM secara tidak nyata. Nilai koefisien lahan terbangun sebesar $0,01714$ ($p \text{ value} = 0,675$) berarti secara tidak nyata dapat menaikkan nilai IPM.
2. tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar $-0,02778$ dapat menurunkan nilai IPM, dan keluarga prasejahtera dengan nilai koefisien sebesar $-0,07781$ ($p \text{ value} = 0,034$) juga berpengaruh secara nyata menurunkan nilai IPM. Pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar $-0,4282$ ($p \text{ value} = 0,146$) secara tidak nyata dapat menurunkan nilai IPM. Pendapatan disektor-sektor ekonomi yang diwakili oleh PDRB berpengaruh positif terhadap penambahan nilai IPM. PDRB sektor kehutanan dengan nilai

koefisien sebesar 0,3411 (p value =0,177) secara tidak nyata dapat menaikkan nilai IPM. Sedangkan PDRB di sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai koefisien sebesar 0,4760 (p value = 0,002) dan 0,7088 (0,071) dapat diartikan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi secara nyata dapat menambah nilai IPM. Sektor jasa dengan nilai koefisien sebesar 0,15745 (p value = 0,067) serta sektor lainnya (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, dan Perdagangan) dengan nilai koefisien sebesar 0,08195 (p value = 0,066) berpengaruh secara nyata terhadap kenaikan nilai IPM.

B. Saran

Ada dua saran yang realistis untuk diberikan dari penelitian ini, yaitu :

1. perlu dilakukannya penelitian pada level kabupaten
2. untuk kebijakan pemerintah dalam hal kesejahteraan hendaknya memperkuat sektor-sektor perekonomian yang memberikan nilai positif terhadap penambahan nilai IPM.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. I. 2009. *Peran agroindustri dalam perekonomian wilayah Provinsi Lampung analisis keterkaitan antar sektor dan aglomerasi industri*. Disertasi. IPB. Bogor. 231 p.
- Afrianto, D. 2010. *Analisis pengaruh stok beras, luas panen, rata-rata produksi, harga beras, dan jumlah konsumsi beras terhadap ketahanan pangan di Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. 119 p.
- Agustinawati, E dan Liestyasari. S.I. 2011. Kemiskinan berperspektif gender di Kota Surakarta. *Jurnal Sosiologi Dilema Dialektika Masyarakat*. 27(2) : 129—138 .
- Ayomi, S 2014. *Analisis pengaruh pertumbuhan sektor utama terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (ipm) di satuan wilayah pembangunan Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012*. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189621&val=6467&title=Analisis%20Pengaruh%20Tingkat%20Pertumbuhan%20Sektor%20Utama%20terhadap%20Tingkat%20Kemiskinan,%20Tingkat%20Pengangguran,%20dan%20Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20\(IPM\)%20di%20Satuan%20Wilayah%20Madiun%20dan%20Sekitarnya%20Tahun%202003-2012](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189621&val=6467&title=Analisis%20Pengaruh%20Tingkat%20Pertumbuhan%20Sektor%20Utama%20terhadap%20Tingkat%20Kemiskinan,%20Tingkat%20Pengangguran,%20dan%20Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20(IPM)%20di%20Satuan%20Wilayah%20Madiun%20dan%20Sekitarnya%20Tahun%202003-2012). Diakses pada 20 Maret 2015.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2005. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*. Buku. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung. 60 p.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*. Buku. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung. 55 p
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*. Buku. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung. 83 p.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2013. *Lampung Dalam Angka*. Buku. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung. 421 p.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2014. *Lampung Dalam Angka*. Buku. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung. 423 p.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2010-2014. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha*. Buku. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung. 77 p.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2000. *Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom di Provinsi Lampung 2000*. Buku. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung. 114 p.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom di Provinsi Lampung 2014*. BPS Provinsi Lampung. Lampung. 423 p.
- Bakri, S.. 2012. *Pembangunan wilayah, fungsi intrinsik hutan dan faktor endogenik pertumbuhan ekonomi sebagai determinan Provinsi Lampung*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 220 p.
- Bapedda. 2013. *Statistik Perekonomian Lampung*. Bapedda Provinsi Lampung. Lampung.
- Biro Perencanaan Sekretaris Jendral Kementerian Kehutanan. 2013. *Profil Kehutanan 33 provinsi*. Buku. Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan. Jakarta. 632 p.
- BKKBN. 1999. *Pemanfaatan data hasil pendataan keluarga dalam program pembangunan*. BKKBN. Jakarta
- Cahyono, S.A. dan W.W. Wijaya. 2014. *Identifikasi sektor ekonomi unggulan dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten di sub DAS Bengawan Solo hulu*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(1): 23—43.
- Dwiprabowo, H, dkk. 2014. *Dinamika Tutupan Lahan: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi*. Buku. PT. Kanisius. Yogyakarta. 140 p.
- Harjanti, A. 2002. *Identifikasi faktor – faktor penyebab perubahan penggunaan lahan permukiman menjadi komersial di kawasan Kemang Jakarta Selatan*. <https://core.ac.uk/download/files/379/11706182.pdf>. Diakses pada tanggal 13 November 2015.
- Hastuti. 2007. *Pengentasan kemiskinan dan pembangunan berwawasan lingkungan*. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dampak Pergeseran Iklim Global dalam Pelestarian Lingkungan Hidup 23 Mei 2007*. UNY . 1—10.
- Hidayat, N.K. 2008. *Analisis hubungan komponen indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Jonaidi, A. 2012. Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 1(1) : 140—164.
- Jundi, M.A. 2014. Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. 123 p.
- Kanninen, M., D. Murdiyarso., F. Seymour., A. Angelsen., S. Wunder., dan L. German. 2009. *Apakah Hutan Dapat Tumbuh Di Atas Uang?. Implikasi Penelitian Deforestasi Bagi Kebijakan yang Mendukung REDD*. Buku. CIFOR. Bogor. 62 p.
- Latifah, E. 2011. Harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada millenium development goals. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(3) : 403—413.
- Mahananto, S.Sutrisno, dan C.F. Ananda. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi studi kasus di Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. *Jurnal Wacana*. 2(1) : 179—191.
- Makmun, F. 2014. Pemetaan kemiskinan di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*. 9(1): 1—19.
- Manik, T. 2013. Analisis pengaruh kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, inflasi, intergovernmental revenue dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 9(2) : 107—124.
- Mirza,D.S. 2012. Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*. 1(1) : 1—15.
- Patta, D. 2012. *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001 – 2010*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar. 87 p.
- Petrus, I.L. 2012. *Analisis faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi investasi sektor transportasi di Indonesia Periode 2001-2010*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar. 57 p.
- Pribadi, D.O., dkk. 2006. Model perubahan tutupan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Tek.Ling P3TL-BPPT*. 7(1) : 35—51.

- Purwanto, S. dan B. S. Hadi . 2014. *Studi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 1987-1996 berdasarkan foto udara* . http://www.academia.edu/10256203/Studi_Perubahan_Penggunaan_Lahan_DI_KECAMATAN_UMBULHARJO_KOTA_YOGYAKARTA_TAHUN_1987-1996_BERDASARKAN_FOTO_UDARA. Di akses pada tanggal 18 Maret 2016.
- Rahmayanti, S. 2012. Respon masyarakat terhadap pola agroforestri pada hutan rakyat penghasil kayu pulp. *Jurnal Mitra Hutan Tanaman*. 7(2): 39—50.
- Ramdani, M. 2015. Determinan kemiskinan di Indonesia tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*. 4(1) : 97—104.
- Rautner, M.,M. Leggett, dan F. Davis. 2013. *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi*. Buku. Global Canopy Programme (GCP). Oxford. 56 p.
- Salim, A. dan G.B. Kahono. 2013. Fenomena kemiskinan pada masyarakat petani sawah (studi kasus pada petani sawah di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan). *Jurnal Sociologie* 1(1) : 53—59.
- Setiawan, M.B. dan A.Hakim. 2013. Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*. 9(1) : 18—26.
- Setiawan, S. 2011. *Kontribusi industri jasa dan perdagangan jasa lintas batas bagi rumusan strategi baru pertumbuhan ekonomi*. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kontribusi%20Industri%20Jasa%20dan%20Perdagangan%20Jasa%20Lintas%20Batas_Sigit%20Setiawan.pdf. Diakses pada tanggal 21 Maret 2016.
- Sukadaryati. 2006. Potensi hutan rakyat di indonesia dan permasalahannya. *Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006*. 54—55.
- Sukmaraga, P. 2011. *Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pdrb per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. 102 p.
- Sulaksono, A. 2015. Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDB sektor pertambangan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 20(1): 16—24.
- Susanto. 1992. *Penginderaan Jauh*; jilid 1. Buku. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 252 p.
- Susetyo, D. 2011. *Analisis pengaruh tingkat investasi, aglomerasi, tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. 70 p.

- Ujiani, D.P. 2006. *Analisis peranan jasa pariwisata dan sektor pendukungnya dalam perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 91 p.
- Utoyo, S.B. 2012. Dinamika penggunaan lahan di wilayah perkotaan (studi di Kota Bandar Lampung). *Prosiding Seminar Hasil Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012*. 142—155.
- Wijanarko, V. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Jember. Jawa Timur. 88 p.
- Wollenberg, E., B. Belcher, D. Sheil, S. Dewi, dan M. Moeliono. 2012. *Governance Brief: Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Poverty&ProPoor/Hutan%20dan%20kemiskinan.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2016.
- Yasa, I.K.O.A dan S. Arka. 2015. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8 (1) : 63—71.